

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

TRIWULAN IV 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SINABANG


Disahkan di Sinabang
Pada Hari Jum'at, 02 Januari 2026

KETUA
PENGADILAN NEGERI SINABANG



RISWANDY, S.H., M.H.

Ketua Tim Survei,



ANTON NURSALEH SIREGAR, S.H.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Maksud dan tujuan	2
1.3.Landasan Hukum	2
1.4.Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1.Metode Penelitian	4
2.2.Populasi dan Sample	4
2.3.Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Tehnik Pengumpulan data dan Quality Control	5
2.5.Tehnik Anailisi dan Data	5
2.6.Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden	8
3.2.Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	20
3.4. Persepsi Responden terhadap kualitas Pelayanan satuan kerja Pengadailan Negeri Sinabang	23
3.5. Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Korupsi Terendah	23
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1.Kesimpulan	25
4.2.Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

- Kuesioner.
- Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. **Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. **Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (Tiga kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu triwulan (tiga bulan) atau data minimal 165 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

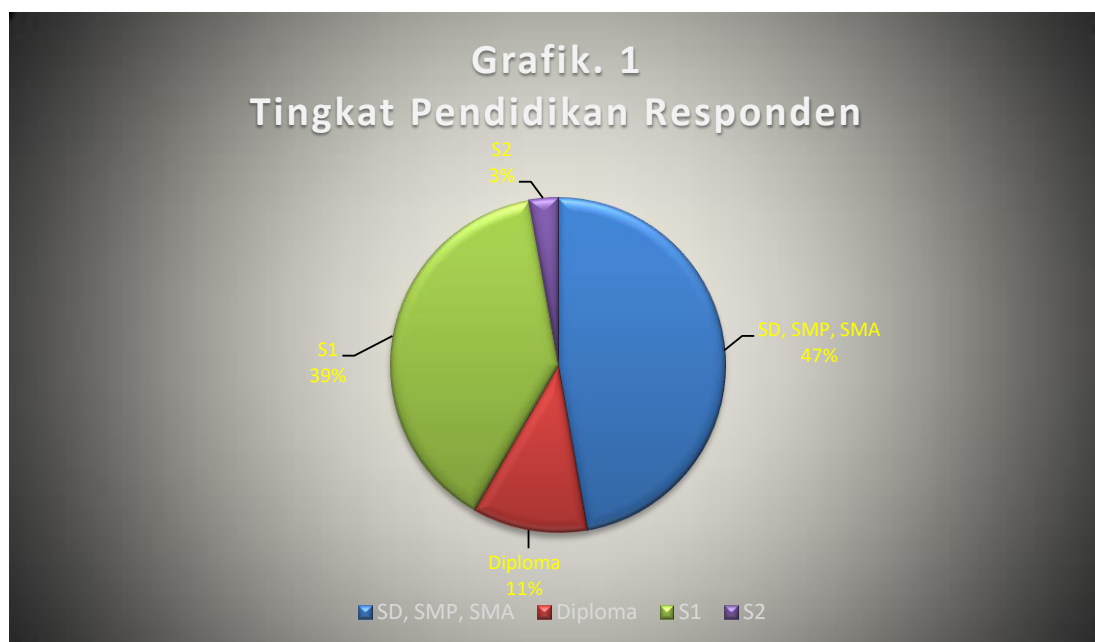
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sinabang, mayoritas memiliki latar Pendidikan S1 sebesar : 39 % ;

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD, SMP, SLTA	17	47
2	Diploma	4	11
3	S1	14	39
4	S2	1	3
Jumlah		36	100

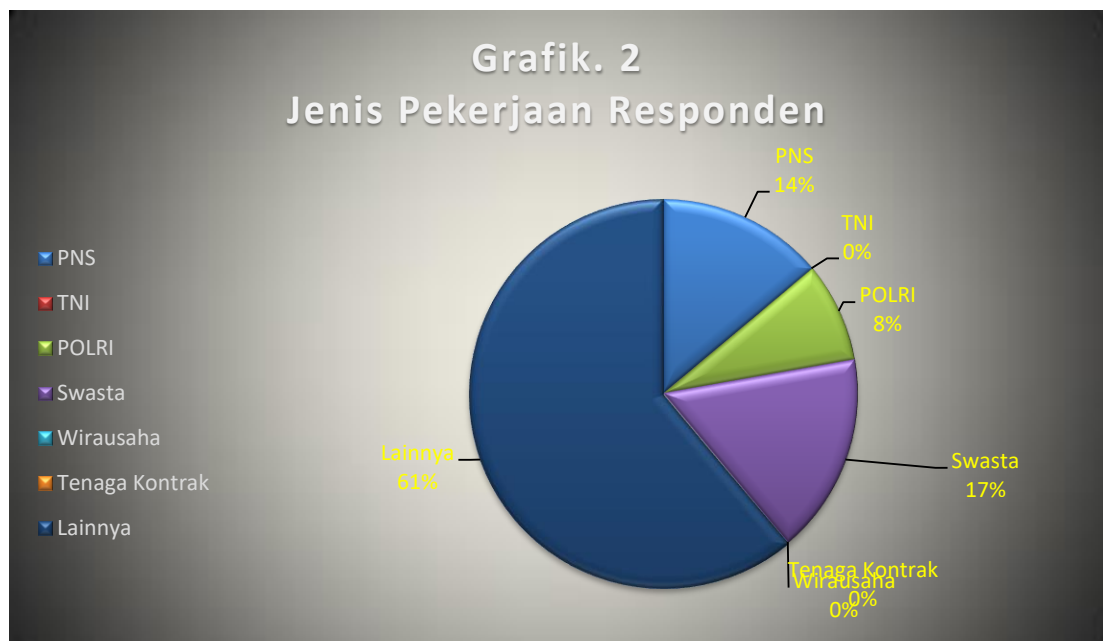


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 0% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Sinabang memiliki pekerjaan sebagai Wirausaha.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	5	14
2	TNI	0	0
3	POLRI	3	8
4	Swasta	6	17
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga kontrak	0	0.0
7	Lainnya	22	61
Jumlah		36	100.0



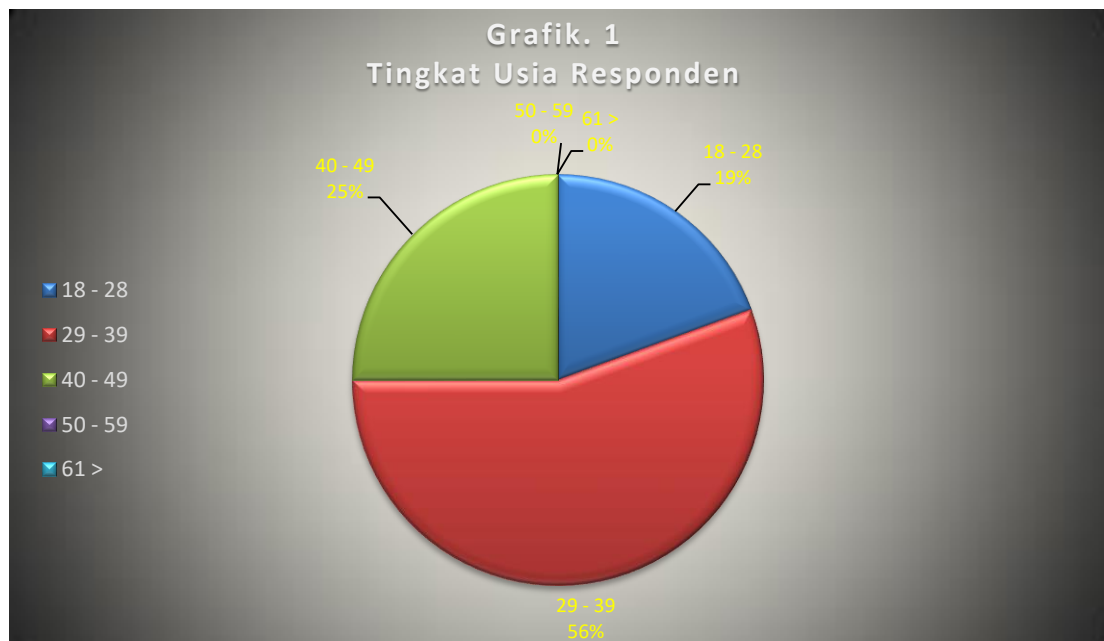
3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam

kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 s/d 39 tahun sebesar 56% .

Tabel 6.
Tingkat Usia responden
 Responden Menurut Karakteristik Umur

N o	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	7	19
2	29-39	20	56
3	40-49	9	25
4	50-59	0	0
5	61>	0	0
Jumlah		36	100



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

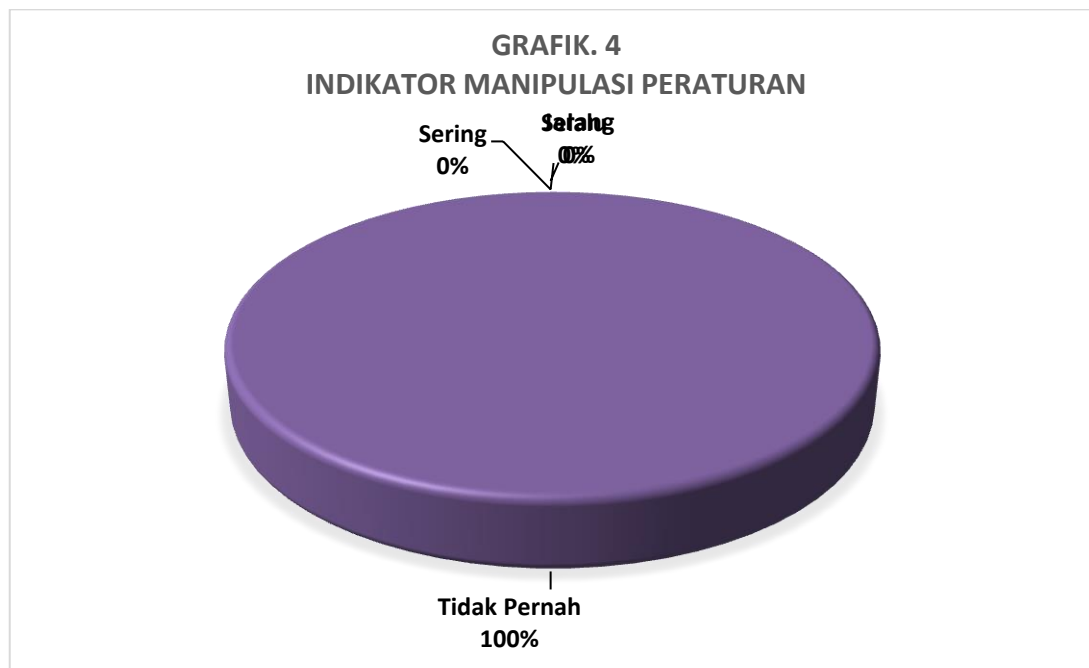
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.”

Tabel 7.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0.0
3.	Sering	2	0	0.0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			36	100



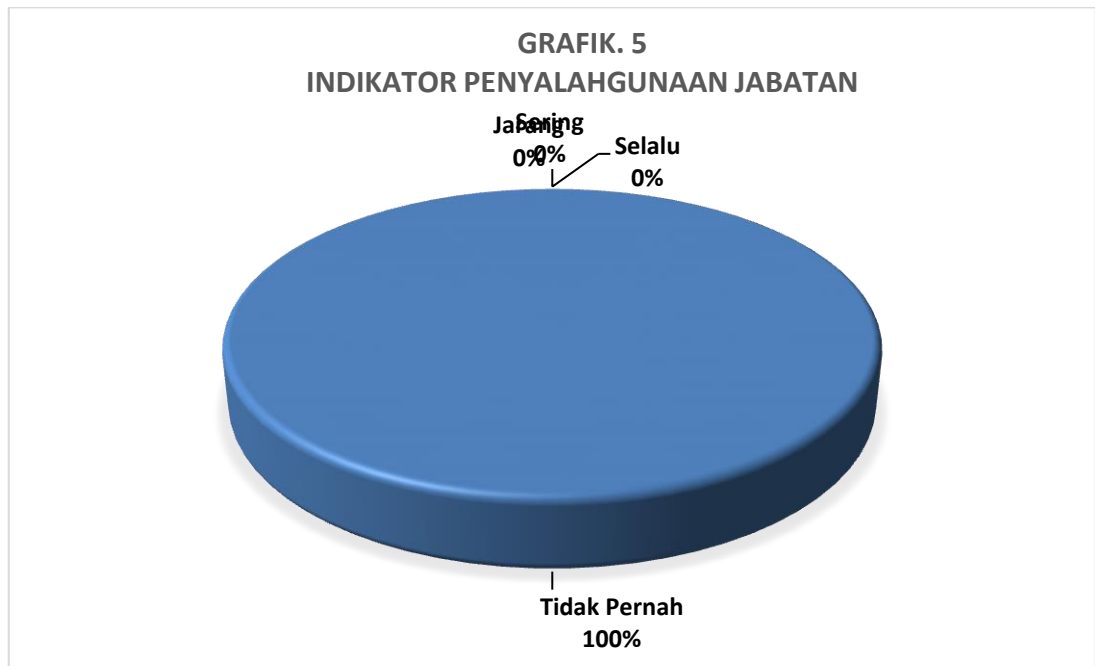
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang bersih dari Korupsi

Tabel 8.

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			36	100

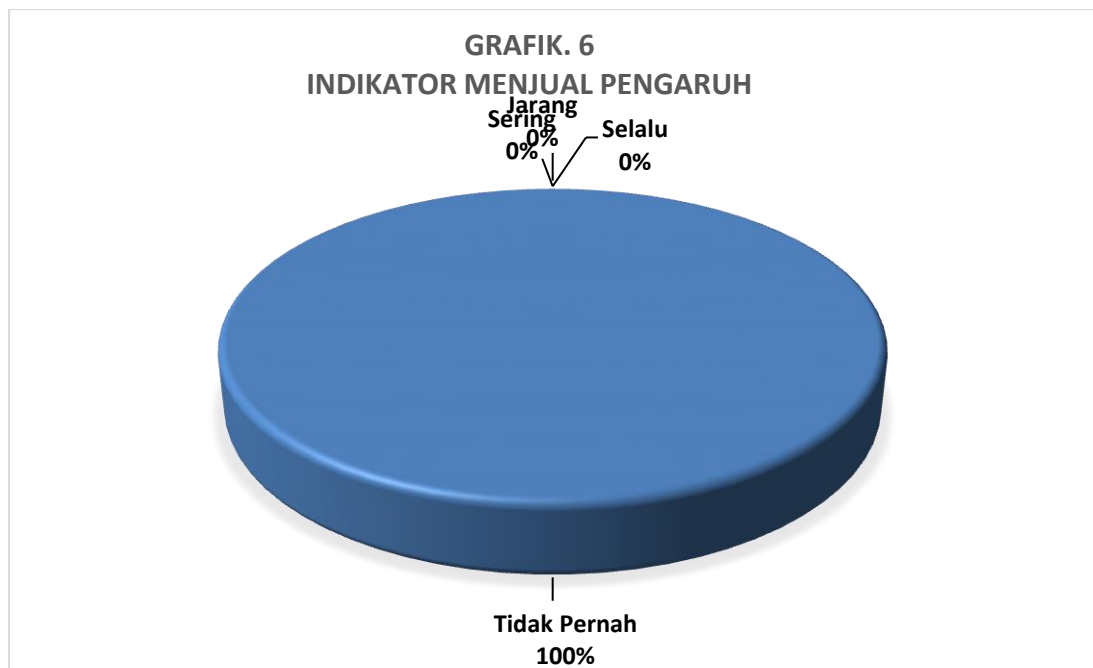


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			36	100

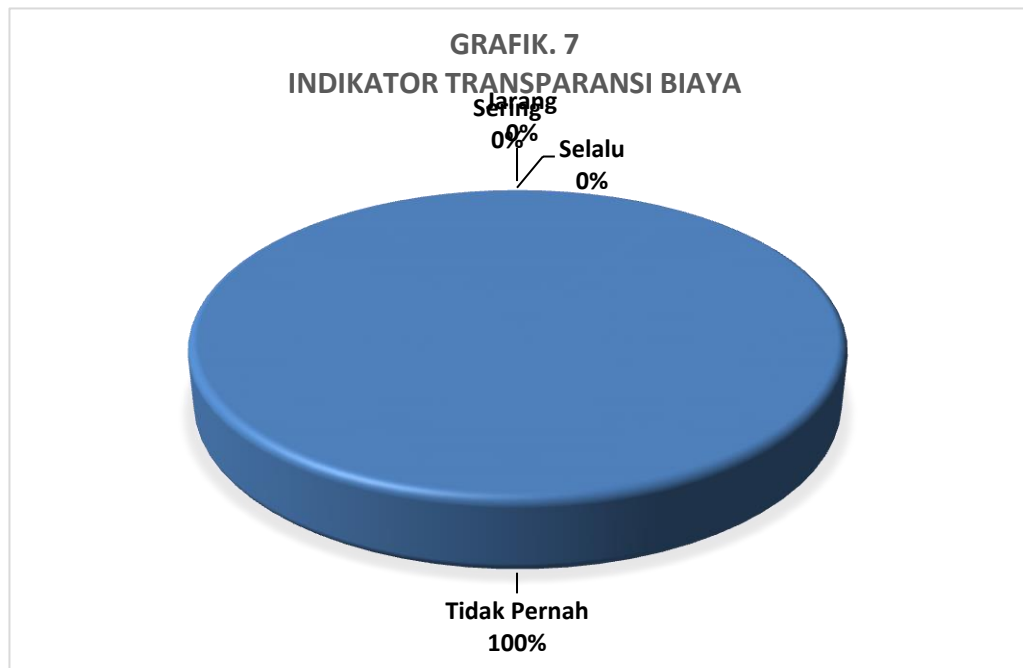


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	36	100
2.	Sering	3	0	0
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			36	100

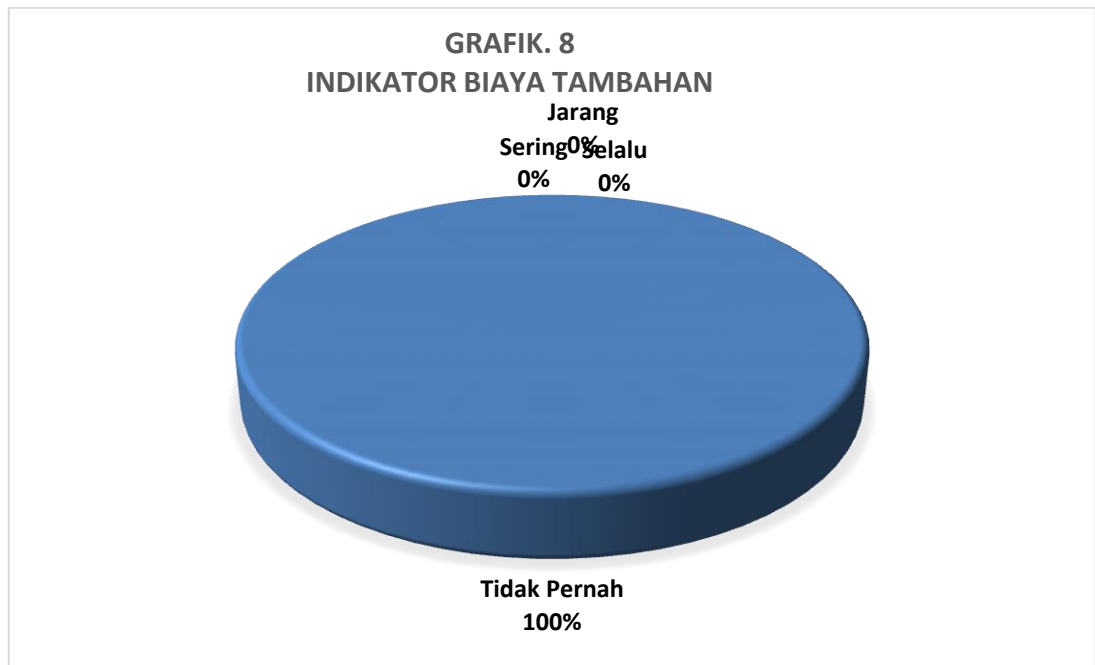


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.
indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			36	100



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.”

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			36	100



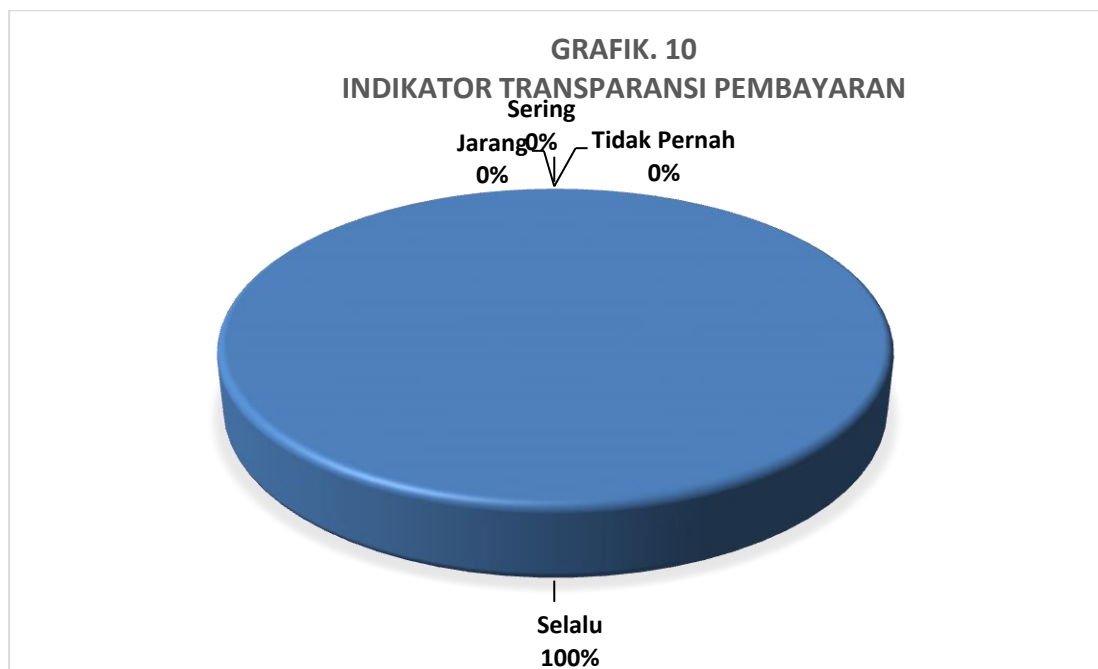
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.’

Tabel 13.

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	36	100
2.	Sering	3	0	0
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			36	100



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responde pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang bersih dari Korupsi.

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0.0
Jumlah			36	100

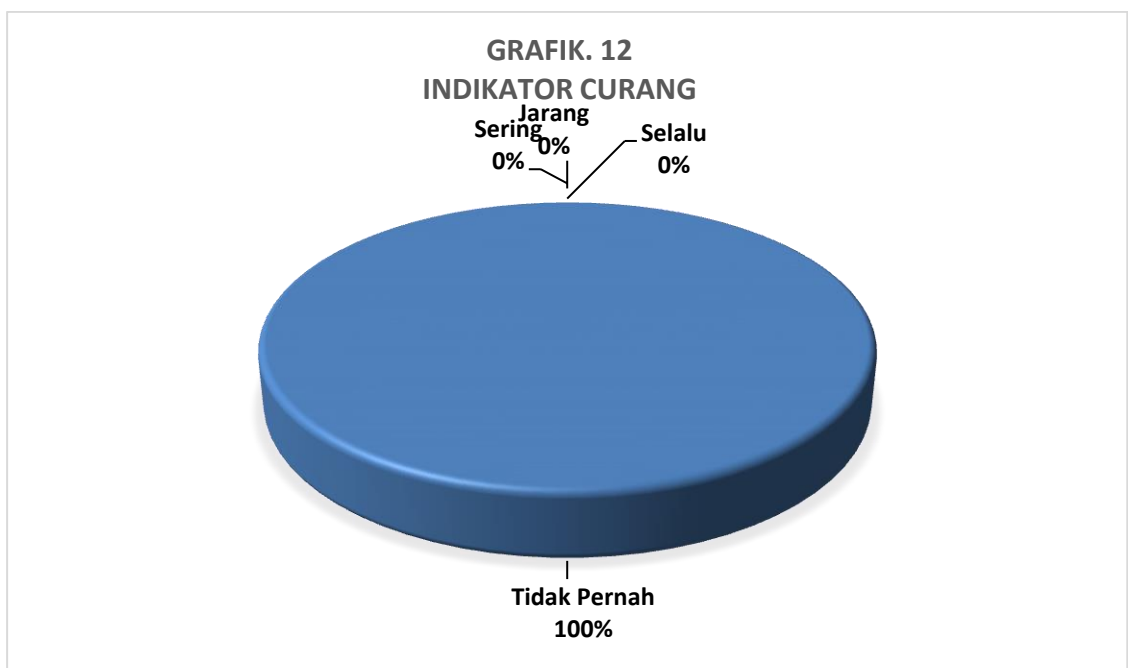


3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Sinabang “Bersih dari Korupsi.”

Tabel 15.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			36	100



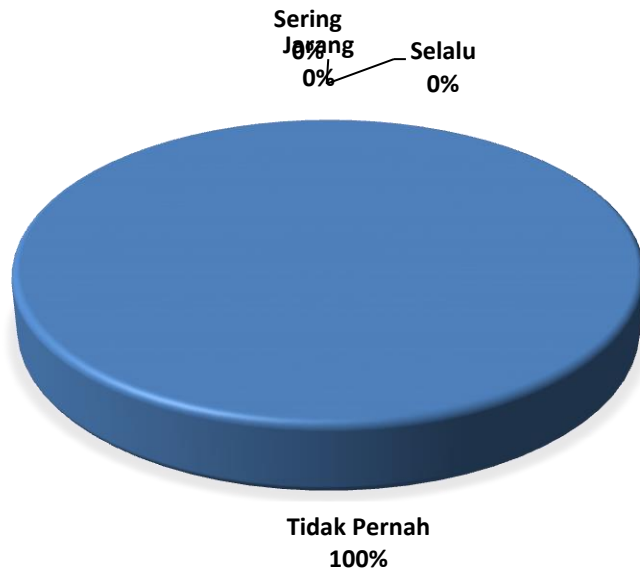
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.0. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang bersih dari Korupsi.

Tabel 16.
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	36	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			36	100

GRAFIK. 13
INDIKATOR TRANSAKSI RAHASIA



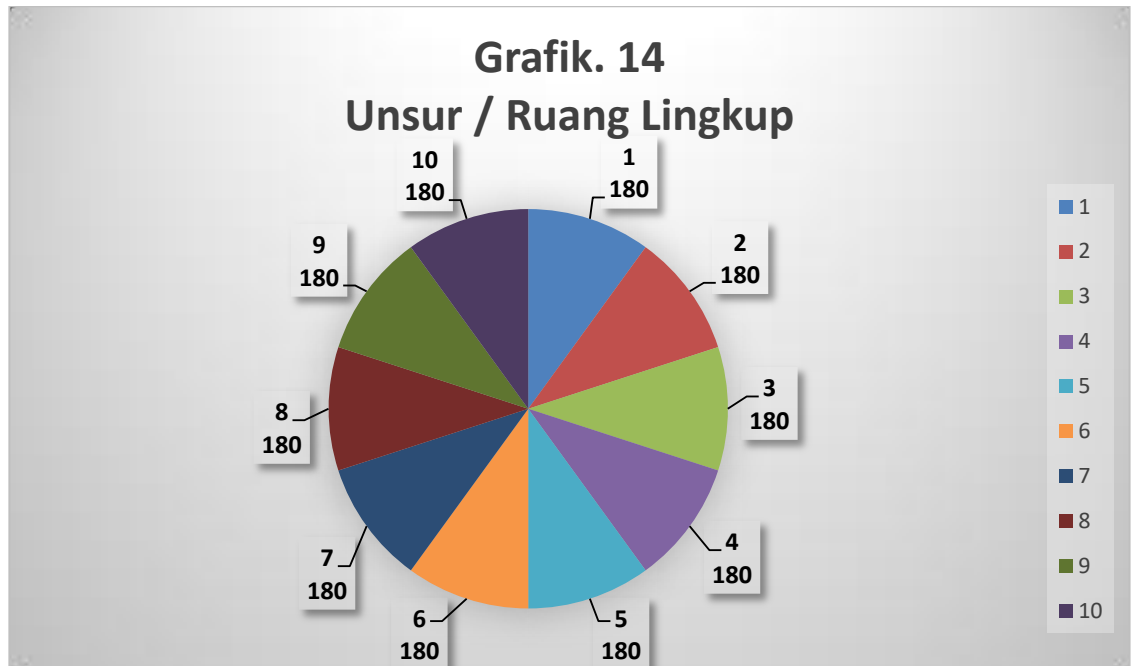
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang sebesar 100,00 %.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang

No Responden	NILAI UNSUR PENILAIAN										Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Nilai Rata-Rata	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
NRR tertimbang	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	4.00 *)
IPK Unit Pelayanan											100,00 **)



Indeks 100,00 % tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Sinabang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkit masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang. Ada pun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

- **“Pengadilan Negeri Sinabang bebas korupsi..”**
- **“semoga pembiayaan pengurusan layanan gratis”**
- **“Petugas melayani secara ikhlas dan tanpa meminta tips”**
- **“Tetap amanah dalam menjalani pekerjaan”**
- **“Semoga semakin ditingkatkan lagi kinerjanya dan semakin jaya”**

3.5. Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Korupsi Terendah

Berdasarkan hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan, terdapat hasil survei 3 (tiga) terendah. Antara lain :

1. Indikator Transaksi Rahasia dengan nilai 4,00;
2. Indikator Perbuatan Curang dengan nilai 4,00;
3. Indikator Pencaloan dengan nilai 4,00;

Tindak lanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah diatas telah dilakukan dengan cara :

1. Indikator Transaksi Rahasia

Transaksi Rahasia telah ditindaklanjuti dengan cara pengadilan Membuat atau menyediakan ruang tamu terbuka Untuk menghindari adanya transaksi rahasia yang di lakukan pada pengadilan negeri sinabang, Pengadilan Negeri Sinabang telah menyediakan ruang tamu terbuka untuk para pengunjung maupun para pencari keadilan berkaitan tentang pelayanan keterbukaan informasi public.

2. Indikator Perbuatan Curang

Perbuatan Curang telah ditinjau lanjuti dengan cara setiap saat diberikan arahan dan tersedianya nomor handphone pengaduan di meja informasi.

3. Indikator Percaloan

Indikator Pencaloan telah ditindaklanjuti dengan cara Para pencari keadilan hadir sendiri pada saat akan memperoleh ataupun mendapatkan informasi terkait keperluannya pada Pengadilan Negeri Sinabang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Sinabang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Sinabang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 98% atau masuk pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.0 ;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.0;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.0 ;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.0 ;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.0 ;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.0 ;
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.0 ;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.0 ;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.0 ;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.0 ;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang Triwulan IV Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.70 atau masuk pada persepsi “Bersih Dari Korupsi”. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Rahasia memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : (boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan :
3. Umur (Tahun) :
4. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
- Pendidikan terakhir : 1. Tidaksekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. PegawaiSwasta 7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya.....

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		JAWABAN
(1)		(2)
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Selalu sesuai prosedur b. Sering sesuai prosedur c. Jarang sesuai prosedur d. Tidak sesuai prosedur
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	a. Petugas melayani tanpa meminta imbalan b. Petugas melayani jarang meminta imbalan c. Petugas melayani sering meminta imbalan d. Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu

- Berikan kritik dan saran serta masukan saudara/i agar Pengadilan Negeri Sinabang dapat jadi lebih baik.

.....

.....

.....